



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-28/PK/2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik di Daerah melalui Program Pembiayaan Kreatif

22 April 2025

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kepemimpinan daerah yang efektif dan transformatif, pemerintah daerah memiliki tugas berat dalam memastikan pemenuhan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, salah satu tantangan umum yang dihadapi adalah keterbatasan ruang fiskal untuk melaksanakan program prioritas yang sudah ditetapkan.
2. Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan publik di daerah, diperlukan langkah strategis melalui kolaborasi lintas unit di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya dengan pengimplementasian kebijakan pembiayaan kreatif dan sinergi pendanaan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, menginisiasi program dalam rangka implementasi pembiayaan kreatif di daerah dengan tajuk "SINERGI" (Kolaborasi Lintas Unit Membangun Negeri) yang akan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan sepanjang Tahun 2025.
4. Secara garis besar, tahapan dan target Program SINERGI*) antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemahaman pemerintah daerah secara menyeluruh terkait teknis kebijakan pembiayaan kreatif dan sinergi pendanaan (April - Juni 2025);
 - b. Pendalaman berdasarkan Identifikasi instrumen pembiayaan kreatif yang sesuai dengan karakteristik dan prioritas pemerintah daerah terkait percepatan pembangunan infrastruktur di daerah (April - Juni 2025); dan
 - c. Koordinasi teknis, pendampingan dan dukungan teknis lainnya kepada pemerintah daerah dalam mengakses program pembiayaan kreatif baik yang bersifat *large-scale project* maupun *small-scale project* (mulai Juni 2025).
5. Sebagai langkah awal, kami berharap seluruh pemerintah daerah dari level pimpinan eksekutif dan legislatif sampai level pelaksana dapat memahami konsep dasar pembiayaan kreatif dan sinergi pendanaan sebagai instrumen dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Untuk itu kami akan menyelenggarakan Program SINERGI Tahap 1 bagian pertama pada:
hari : Rabu, 30 April 2025
jam : 09.00 – selesai
media : *Zoom Meeting* (diawali dengan pendaftaran pada tautan: s.kemenkeu.go.id/SINERGI)
6. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Saudara/i dapat mengikuti kegiatan dimaksud serta mengoordinasikan keterlibatan unit teknis di pemerintah daerah Saudara/i antara lain:
 - a. Badan/Dinas yang bertugas di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Badan yang bertugas di Bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Dinas yang bertugas di Bidang Pengelolaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Dinas yang bertugas di Bidang Pengelolaan Air Minum;
 - e. Dinas yang bertugas di Bidang sanitasi dan pengelolaan sampah;
 - f. Dinas yang bertugas di Bidang Perhubungan; dan
 - g. Inspektorat Daerah.

7. Sebagai bagian dari rangkaian Program SINERGI, kami telah melakukan identifikasi kebutuhan terhadap instrumen pembiayaan kreatif bagi pemerintah daerah berdasarkan data sekunder antara lain data belanja infrastruktur pada APBD, rasio kapasitas fiskal daerah, data ketersediaan SPAM, sanitasi, dan jalan.
8. Untuk mendapatkan hasil identifikasi yang optimal dan tidak bias serta sesuai dengan karakteristik dan prioritas masing-masing daerah, kami perlu mengelaborasi hasil identifikasi yang telah kami lakukan dengan data dan keterangan langsung dari pemerintah daerah. Untuk itu, harap Saudara/i dapat mengoordinasikan dan memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan dimaksud melalui tautan s.kemenkeu.go.id/DaerahBerSINERGI.
9. Selanjutnya, kami berharap Saudara/i dapat menjadi *leading sector* dalam kolaborasi program SINERGI dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur di daerah dan mengeskalasikan informasi tersebut kepada masing-masing pimpinan daerah. Untuk informasi lebih lanjut, dapat berkoordinasi dengan pegawai kami Sdri. Muthi'ah Khoirunnisa (087818806686) dan Sdr. Tedy Kurniawan (0811500424).

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Selanjutnya, untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
5. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

^{*)} SINERGI merupakan bagian/member dari Program BETTER w/ DJPK. Seluruh informasi Program BETTER w/ DJPK dapat diakses melalui s.kemenkeu.go.id/Better_With_DJPK

